

DPRD Ingatkan Jangan Sampai Bus Kita Seperti Trans Pakuan, Jadi Besi Tua

BOGOR (IM)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor mewanti-wanti Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor setelah 10 armada Bus Kita Trans Pakuan mulai mengaspal di Kota Bogor pada awal November ini.

Kehadiran bus pengganti Trans Pakuan yang didanai oleh pemerintah pusat ini diharapkan wakil rakyat tak senasib dengan bus Trans Pakuan yang kebanyakan menjadi besi tua dan programnya mati suri.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Zaenul Mutaqin meminta, agar Pemkot Bogor dan Wali Kota Bogor, Bima Arya mengelola bus baru ini dengan sangat baik.

"Jangan terlelap dalam euforia, perawatan bus harus diperhatikan, terlebih keberadaan bus ini masih full subsidi pemerintah karena gratis. Jangan sampai nanti di akhir tahun malah sudah rusak," ungkap pria yang akrab disapa ZM pada Selasa (2/11) malam.

ZM melanjutkan, dirinya mendukung keberadaan bus dan program Buy The Service (BTS) di Kota Bogor. Namun ia lagi-lagi mewanti-wanti Wali Kota Bogor agar sekiranya kehadiran bus ini sejalan dengan program rerouting dan reduksi angkot yang menjadi satu-satunya persoalan yang belum terselesaikan hingga periode kedua Bima Arya.

"Saya tidak mau melihat nasib puluhan bus baru ini akan bernasib sama dengan bus Trans Pakuan yang kini sudah menjadi bangkai besi tua di Terminal Bubulak," ungkap ZM yang juga Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Bogor.

"Pemkot harus serius dan konsisten dalam mengelola

moda transportasi masal ini, program BTS tentu saja harus sejalan dengan komitmen konversi angkot ke bus. Karena tujuannya mengurangi kemacetan tanpa mengurangi pelayanan transportasi kepada masyarakat. Jangan sampai terulang pengalaman pengelolaan Trans Pakuan terdahulu yang dianggap gagal dan malah menyisakan masalah," tambahannya.

ZM membeberkan, kepada Pemkot Bogor agar memerhatikan nasib para supir angkot yang dijadikan supir bus. Walau bagaimanapun konversi angkot ini pasti berpengaruh terhadap hilangnya mata pencaharian bagi sebagian sopir angkot yang tidak terakomodir menjadi sopir bus Trans Pakuan.

"Tidak mungkin seluruh sopir angkot bisa beralih menjadi sopir bus, karena jumlah bus jauh lebih sedikit dari jumlah angkot yang dikonversi. Inilah masalah yang akan timbul, dan tentu saja harus dicarikan solusinya oleh pemkot," jelasnya.

Ia memaparkan, pengelolaan bus Trans Pakuan ini diketahui akan dikelola oleh konsorsium PDJT, selagi Pemkot Bogor melakukan restrukturisasi terhadap perusahaan yang didirikan sejak 2006 ini. ZM berharap, dana dari pemerintah pusat bisa dikelola dengan baik, sehingga menghadirkan kenyamanan dan rasa aman kepada warga Kota Bogor dalam menggunakan moda transportasi massal.

"Dana puluhan miliar untuk mengoperasikan BTS ini harus dikelola dengan baik. Nantinya kami juga akan menggunakan hak pengawasan kami untuk memastikan anggarannya tepat guna," pungkasnya. ● **gio**

Vaksinasi Lansia Rendah, Kab. Bogor Masih PPKM Level 3

CIBINONG (IM)- Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor menyampaikan, wilayahnya masih berstatus Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, karena perkembangan vaksinasi lansia belum mencapai angka 40 persen.

"Walaupun capaian vaksinasi lebih dari 50 persen, tapi vaksinasi lansia di bawah 40 persen. Sedangkan syarat turun ke Level 2 harus 50 persen vaksinasi dan 40 persen vaksinasi lansia," kata Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor Ade Munawaroh Yasin di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/11).

Berdasarkan data terbaru pada 2 November 2021, vaksinasi dosis pertama bagi lansia di Kabupaten Bogor sebesar 33,68 persen atau 93.506 orang dari target 277.614 sasaran. Sedangkan dosis kedua baru 58.341 orang atau 21,02 persen dari target. Pada periode yang sama, vaksinasi dosis pertama di

Kabupaten Bogor sebesar 50,54 persen atau 2.135.630 orang dari target 4.225.790 sasaran.

Sedangkan dosis kedua mencapai 1.404.320 orang (33,23 persen) dari target. Ade menyebutkan, banyaknya penduduk di Kabupaten Bogor menjadi salah satu kendala pelaksanaan vaksinasi. Pasalnya, jumlah penduduk di Kabupaten Bogor tercatat paling banyak jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Indonesia. Diperkirakan jumlah penduduk Kabupaten Bogor 5,4 juta jiwa.

Kendala lainnya adalah Kabupaten Bogor memiliki wilayah yang luas dengan 40 kecamatan, sehingga Satgas Penanganan Covid-19 kesulitan menjangkau lokasi-lokasi di pelosok.

Oleh karena itu, kata Ade, harus berkolaborasi dengan berbagai instansi, termasuk TNI-Polri untuk melakukan jemput bola pada pelaksanaan vaksinasi di wilayah pelosok. ● **gio**



BONEKA PAKAIAN ADAT DARI BARANG BEKAS

Perajin menyelesaikan pembuatan boneka pakaian adat di Iboh Collection, Depok, Jawa Barat, Rabu (3/11). Kerajina dari botol bekas yang dijadikan boneka dengan pakaian adat tersebut dijual dengan harga Rp30 ribu hingga Rp350 ribu per pasang tergantung ukuran dan tingkat kesulitan serta dipasarkan ke berbagai daerah seperti Malang, Palembang, dan Padang.

Oded Ajak Wilayah di Luar Kota Bandung Tangani Banjir

BANDUNG (IM)- Wali Kota Bandung, Oded Muhammad Danial memerintahkan jajarannya untuk intensif berkoordinasi dengan kabupaten dan kota lain di sekitarnya di Provinsi Jawa Barat (Jabar), guna membahas penanganan banjir yang mulai timbul pada musim hujan akhir 2021.

"Dalam menghadapi musim hujan ini secepatnya kita adakan rapat kerja rekonsiliasi dengan wilayah lain, pemerintah lain, dalam hal ini dengan Cimahi dan Kabupaten Bandung. Asda (Asisten Sekretaris Daerah) 1 sudah ada rapat dengan mereka, tapi keburu banjir datang," kata Oded di Kota Bandung, Provinsi Jabar, Rabu (3/11).

Menurut dia, hal yang perlu dibahas dan ditangani segera, yakni banjir di kawasan perbatasan daerah seperti yang terjadi di Jalan Amir Machmud Cimindi, Kota Cimahi, Selasa (2/11) malam WIB. Termasuk juga wilayah akses keluar masuk Kota Bandung, seperti di Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung yang kerap dilanda banjir.

Oded juga memerintahkan jajarannya mengajak pemerintah

daerah sekitar agar intensif berkoordinasi dengan level Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Hal karena penanganan banjir di Bandung Raya perlu dimediasi Pemprov Jabar.

"Jajaran sudah meminta izin lagi, hari ini besok dan akan terus mengonsolidasikan ini dengan provinsi, karena hal ini perlu diperhatikan dengan adanya kebersamaan dengan provinsi juga," kata Oded.

Menurut politikus PKS tersebut, penanganan banjir di wilayah Bandung Raya tidak bisa hanya secara parsial per wilayah, namun juga perlu ditangani masing-masing wilayah secara beriringan. "Karena ini tidak bisa parsial, ini harus ada kerja sama dengan wilayah lain. Tapi kan harus ada yang mediasi dari provinsi," kata Oded.

Di Kota Bandung tercatat ada 17 titik banjir saat hujan mengguyur wilayah Bandung pada Selasa (2/11) sejak sore hingga malam hari. Banjir paling parah terjadi di kawasan Babakan Ciberum dengan air setinggi 60 sentimeter (cm) sehingga air masuk rumah warga. ● **pur**

8 | Nusantara



BANJIR KAWASAN BANDUNG SELATAN
Warga berjalan pada genangan banjir di Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/11). Sedikitnya tiga kecamatan di kawasan Bandung Selatan terdampak banjir dengan ketinggian air 10cm hingga 140cm akibat luapan Sungai Citarum dan intensitas curah hujan yang tinggi.

IDN/ANTARA

Rawan Penipuan! Ade Yasin Imbau Warga tak Tergiur Beli Tanah Murah

Dulu saya pernah ditawari untuk membeli lahan di Kecamatan Cijeruk dengan harga yang murah. Namun setelah dicek ke bank tanah, ternyata tanah tersebut berada di lahan eks HGU PT. BSS hingga saya membatalkan niat tersebut. Karenanya masyarakat diimbau untuk berhati-hati dalam membeli tanah hingga terhindar dari masalah di kemudian hari," kata Ade Yasin.

CIBINONG (IM)- Bupati Bogor, Ade Yasin meminta warga di daerahnya untuk berhati-hati ketika hendak membeli tanah dengan harga murah.

Ade Yasin bercerita pernah ditawari untuk membeli tanah di lahan eks HGU PT. Bahana Sukma Sejahtera (BSS) di wilayah Kecamatan Cigombong, Cijeruk dan Caringin

dengan harga yang murah. Untungnya ia mengecek ke bank, karena tanah bukan milik pribadi, dan ia pun tidak jadi membeli tanah di kaki Gunung Halimun Salak Endah (GHSE) tersebut.

Setelah membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Bogor dengan Kantor ATR/BPN, karena perintah negara, ia

bersama tim pun akan menertibkan peruntukan lahan eks HGU PT. BSS tersebut, terutama bangunan rumah atau vila yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB)

"Dulu saya juga pernah ditawari untuk membeli lahan di Kecamatan Cijeruk dengan harga yang murah. Namun setelah dicek ke bank tanah, ternyata tanah tersebut berada di lahan eks HGU PT. BSS hingga saya pun membatalkan niat tersebut dan mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam membeli tanah hingga terhindar dari masalah di kemudian hari," kata Ade Yasin kepada wartawan, Rabu (3/11).

Karena perintah negara, wanita berusia 53 tahun yang juga menjabat sebagai Ketua Tim GTRA Kabupaten Bogor itu pun akan menertibkan peruntukan atau kepemilikan di lahan eks HGU PT. BSS.

"Tim GTRA Kabupaten Bogor sedang membenahi lahan-lahan eks HGU, teru-

tama bangunan atau vila yang kuat diduga tidak berIMB, kami menyangkan, mereka seenaknya saja menduduki lahan tersebut dan membangun vila di atasnya," terangnya.

Ade menuturkan selain bangunan rumah dan vila, di lahan eks HGU PT. BSS juga ditanami tanaman hortikultura maupun menjadi lahan pertanian. Ia pun masih memaklumi hal tersebut.

"Kalau lahan eks HGU PT. BSS tersebut masih diperuntukkan perkebunan dan pertanian, saya sih masih memakluminya. Karena dari segi peruntukan, lahan tersebut sudah fix, maka Satpol siap melakukan pembongkaran bangunannya dan kami pun siap 'memploting' anggarannya," tutur Ade.

Sementara Kabid Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabu-

paten Bogor, Eko Murjianto menuturkan bahwa lahan eks HGU PT. BSS diduga kuat dalam pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

"Ada informasi, bahwa lahan eks HGU PT. BSS tersebut dalam pengawasan DJKN, hingga tidak mungkin beralih kepemilikannya. Saat ini, memang lahan tersebut banyak yang dikuasai oknum masyarakat baik dalam bangunan vila maupun pertanian dan perkebunan," tutur Eko.

Sedangkan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman meminta pemerintah pusat memberikan dukungan dalam penertiban peruntukan dan kepemilikan di lahan eks HGU PT. BSS.

"Saya minta, lahan eks HGU PT. BSS tersebut dikembalikan lagi pemanfaatannya jadi lahan hijau atau LP2B dan pemerintah pusat harus mendukung langkah Tim GTRA Kabupaten Bogor," pinta Usep. ● **gio**

Warga Korban Banjir dan Longsor di Kabupaten Bogor akan Direlokasi

CIBINONG (IM)- Pemerintah Kabupaten Bogor bersiap merelokasi warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada Januari 2020. Pemerintah telah menyiapkan lokasi baru untuk warga, termasuk telah dibuatkan bangunan tempat tinggal.

Total ada 181 hunian tetap untuk warga Urug, lokasinya tepat berada di area perkebunan sawit, tidak jauh dari kantor desa.

"Karena kita tidak cuma memindahkan orangnya ke tempat baru. Tapi juga harus memindahkan kehidupan mereka ke tempat baru itu," kata Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Ajat R Jatnika, Rabu (3/11).

Terlebih warga Kampung Urug, Desa Urug, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor masih memegang teguh adat istiadat, seperti masih menggunakan rumah panggung untuk tinggal dan lainnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Pemkab Bogor telah menyiapkan 24 unit hunian tetap berupa rumah panggung, tiga unit rumah agung masjid, pasar kampung, klinik kesehatan, lapangan bola hingga leuit untuk penyimpanan beras.

"Jadi yang dibangun tidak hanya fisik rumah saja. Bukan hanya memindahkan penduduk

dari lokasi rawan bencana ke lokasi yang baru, melainkan juga membangun kembali kehidupannya," ujar Ajat.

Dia menambahkan, jajarannya juga akan melibatkan Dinas Pertanian, Holtikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) dalam membangun kehidupan di Kampung Urug 'Baru'.

Setiap halaman hunian baik yang ditinggal maupun rumah adat panggung akan ditanam pohon buah, tanaman obat atau lainnya hingga masyarakat Kampung Urug tetap produktif.

"Kita membangun konsep rumah produktif, ada tanaman khas yang di tanam di halaman rumah," imbuhnya.

Selain itu dalam pengelolaan sampah, DKPP dibantu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan membentuk bank sampah dan kampung ramah lingkungan.

Ajat sapaan akrabnya menuturkan, Pemkab Bogor mendukung pelestarian adat di Kampung Urug, bahkan, dalam mendesain rumah adat panggungnya, faktor sirkulasi dan udara juga diperhatikan agar bisa hemat energi.

"Pemkab Bogor maupun pemerintah pusat siap mendukung kelestarian Kampung Adat di Kampung Urug, Desa Urug, Sukajaya. Dalam pembangunan huntut adat panggungnya kami juga berkonsep green living karena dalam mendesain rumah adat panggung tersebut, kami

memperhitungkan faktor sirkulasi dan udara," tutur Ajat.

Sementara itu Kepala Desa Urug, Sukarma menjelaskan alasan mempertahankan membangun hunian tetap berupa rumah adat panggung karena masyarakatnya tidak ingin adat istiadat dari leluhurnya hilang begitu saja.

"Pasca bencana alam banjir bandang dan tanah longsor awal Tahun 2020 lalu, 24 unit rumah adat panggung dan puluhan unit leuitnya mengalami kerusakan parah, demi melestarikan adat istiadat dari leluhur, kami pun meminta KemenPU-PR dan Pemkab Bogor mengganti rumah adat dan leuit kami yang rusak seperti sebelumnya. Alhamdulillah, permintaan kami dikabulkan," jelas Sukarma.

Agar sesuai aturan adat istiadat, ia menerangkan dalam pembangunan hunian tetap adat panggung, leuit dan rumah agung, warga pun dilibatkan oleh penyedia jasa rekanan KemenPU-PR.

"Kami punya cara atau aturan sendiri alam membangun rumah adat panggung, leuit dan rumah agung. Alhamdulillah, kearifan lokal Kampung Urug dihargai dan bahkan didukung oleh pemerintah, termasuk tidak melaksanakan pembangunan Huntutnya pada Bulan Maulud. Karena hal itu, pembangunan Huntut pun kami hentikan sementara," tandasnya. ● **gio**



NELAYAN TIDAK MELAUT DAMPAK SOLAR INDUSTRI NAIK

Sejumlah nelayan berada di atas kapal 30 GT saat tidak melaut di Pelabuhan Jongor, Tegal, Jawa Tengah, Rabu (3/11). Menurut para nelayan sebagian kapal diatas 30GT tidak melaut dampak kenaikan harga solar industri untuk nelayan.

IDN/ANTARA

Irawansyah Gantikan Zenton Pimpin LBH Bogor



BOGOR (IM)- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bogor yang konsen terhadap pemberian Advokasi dan Bantuan Hukum bagi warga yang kurang mampu terhitung sejak hari Rabu (3/11).

Peralihan kepemimpinan ini berdasarkan kesepakatan para pengurus sebelumnya, di kawasan Bellanova Coutry Mall, Sentul City.

Serah terima jabatan Direktur Eksekutif LBH Bogor yang semula dijabat oleh Zentoni dan selanjutnya diserahkan kepada Irawansyah.

Serah terima jabatan ini menurut Zentoni adalah suatu keniscayaan dan harus dilakukan agar roda organisasi tetap berputar, apalagi dalam hal ini LBH Bogor yang merupakan organisasi bantuan hukum yang sudah cukup mapan dan dikenal luas oleh masyarakat Kabupaten Bogor dan Kota Bogor.

Bagi masyarakat ingin berkonsultasi atas masalah-masalah hukum yang mereka alami bias datang ke kantor yang beralamat di Bellanova Caontry Mall (Ruko RK 2 No. 3) dan Jl. M.H. Thamrin No. 8, Sentul Selatan, Kabupaten Bogor 1681 atau Hp/Wa: 081310919997. ● **gio**

masyarakat Kabupaten Bogor dan Kota Bogor tanpa membedakan kelas sosial, ras dan keyakinan.

Sedangkan Irawansyah berjanji akan tetap melaksanakan program-program kerja yang telah dicanangkan oleh pendiri oleh LBH Bogor sebelumnya.

Secara pribadi dia mengucapkan rasa kasih yang tak terhingga kepada Zentoni selaku senior di LBH Bogor yang telah susah payah mendirikan LBH Bogor sampai dikenal luas oleh masyarakat sampai saat ini.

Kedepannya Irawansyah bertekad akan membuka lebar-lebar pintu kantor LBH Bogor kepada masyarakat Kabupaten Bogor dan Kota Bogor.

Bagi masyarakat ingin berkonsultasi atas masalah-masalah hukum yang mereka alami bias datang ke kantor yang beralamat di Bellanova Caontry Mall (Ruko RK 2 No. 3) dan Jl. M.H. Thamrin No. 8, Sentul Selatan, Kabupaten Bogor 1681 atau Hp/Wa: 081310919997. ● **gio**